

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI IV DPR RI  
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,  
SERTA KELAUTAN)**

---

Tahun Sidang : 2019-2020  
Masa Persidangan : I  
Rapat ke- : 20  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara I s.d. XIV  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari/Tanggal : Kamis, 5 Desember 2019  
Waktu : 10.35 s.d. 16.35 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)  
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta  
Acara : Membahas Prospek Pengembangan Usaha Perkebunan dalam rangka Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Pelaku Usaha.  
Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F.PDIP)  
Sekretaris Rapat : Drs. Budi Kuntaryo  
Hadir : A. Anggota dari 54 Anggota Komisi IV DPR RI  
B. Hadir Pemerintah:  
1. Uri Mulyari (Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara I);  
2. M. Iswan Achir (Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara II);  
3. Muhammad Arwin Nasution (Direktur Komersil PT Perkebunan Nusantara II);  
4. Marisi Butar Butar (Direktur Operasional PT Perkebunan Nusantara II);  
5. Mohammad Abdul Ghani (Plt. Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III);  
6. Ahmad Haslan Saragih (Direktur Pelaksana PT Perkebunan Nusantara III);  
7. Mahmudi (Direktur Produksi dan Pengembangan PT Perkebunan Nusantara III);  
8. Siwi Peni (Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara IV);  
9. Jatmiko Krisna Santosa (Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara V);

10. Ospin Sembiring (Direktur Operasional PT Perkebunan Nusantara V);
11. Rurianto (Direktur Komersial PT Perkebunan Nusantara V);
12. Berlino Mahendra Santosa (Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara VI);
13. Muhammad Hanugroho (Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara VII);
14. Wahyu (Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara VIII);
15. Ryanto Wisnuardhy (Direktur Komersial PT Perkebunan Nusantara VIII);
16. Jhoni Halintar Tarigan (Direktur Operasional PT Perkebunan Nusantara VIII);
17. Iryanto Hutagaol (Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara IX);
18. Tio Handoko (Direktur Perencanaan dan Pengembangan);
19. Ir. Dwi Satriyo Annurogo, MT (Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara X);
20. Ir. Sucipto Prayitno, M.M. (Direktur Komersial PT Perkebunan Nusantara XI);
21. Wien Irwanto, S.E., M.Si. (Direktur Komersil PT Perkebunan Nusantara XII);
22. Alexander Maha (Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara XIII);
23. Doni P. Gandamihardja (Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara XIV).

## **I. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara I s.d. XIV membahas Prospek Pengembangan Usaha Perkebunan dalam rangka Meningkatkan Kesejahteraan Petani dan Pelaku Usaha, dibuka pukul 10.35 WIB oleh Ketua Rapat, Sudin, S.E. dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## **II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan pengembangan usaha perkebunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku usaha yang dilakukan oleh PT Perkebunan Nusantara (PTPN)  *Holding*. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI mendorong PTPN  *Holding* agar dapat meningkatkan kinerja untuk menghasilkan kuantitas dan kualitas komoditas yang tinggi dalam rangka mendukung pertumbuhan perekonomian Negara di sektor perkebunan dengan tetap melibatkan petani dan pelaku usaha.
2. Komisi IV DPR RI mendukung agar PTPN  *Holding* segera menyelesaikan legalitas lahan yang berada di kawasan PTPN  *Holding*, khususnya lahan yang dikuasai oleh rakyat/petani dengan memberikan solusi yang tidak menimbulkan konflik sosial.

3. Komisi IV DPR RI mendukung agar program peremajaan sawit rakyat segera dipercepat dan dana yang berasal dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit harus digunakan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat guna sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Perpres Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
4. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah bersama PTPN  *Holding* untuk mengeluarkan kebijakan terkait perlindungan harga komoditas perkebunan di tingkat petani.
5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Keuangan c.q. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk memberikan alokasi anggaran peremajaan tanaman kelapa sawit di kebun plasma di bawah PTPN  *Holding*.
6. Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah untuk memprioritaskan hilirisasi industri perkebunan agar tidak terpengaruh oleh volatilitas harga komoditas di pasar dunia.
7. Komisi IV DPR RI meminta PTPN  *Holding* untuk melakukan evaluasi dan optimalisasi aset yang tidak digunakan karena tidak sesuai dengan peruntukannya, guna mengurangi beban hutang/kerugian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan perbaikan, pengelolaan, dan pengendalian manajemen secara profesional dengan menerapkan manajemen modern.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.35 WIB.

Plt. Direktur Utama  
PT Perkebunan Nusantara III  
( *Holding*),

Ttd.

**Mohammad Abdul Ghani**

Komisi IV DPR RI  
Ketua Rapat,

Ttd.

**Sudin, S.E.**  
**A-151**